

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era perubahan teknologi dan tantangan global yang terus berkembang, lembaga pertahanan negara dituntut memiliki sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, profesional, dan unggul. Aparatur sipil dituntut mampu memainkan peran serta mempunyai kompetensi, yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.¹

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari upaya transformasi sistem kepegawaian nasional yang bertujuan menciptakan ASN profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan sumber daya manusia aparatur sipil negara, pemerintah menetapkan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan jabatan-jabatan fungsional secara lebih fleksibel dan responsif. Dalam rangka mendukung peran strategis PPPK, diperlukan program pendidikan dan pelatihan (diklat) orientasi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu membentuk pemahaman terhadap nilai-nilai dasar ASN, etika birokrasi, serta budaya organisasi kementerian/lembaga tempat mereka bertugas. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menpan RB No. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK.

Diklat orientasi menjadi instrumen penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar ASN, pengenalan terhadap sistem pemerintahan, serta pembentukan sikap dan etos kerja sesuai dengan budaya organisasi masing-masing instansi. Di lingkungan Kementerian Pertahanan RI, keberadaan

¹ Alhani. (2016). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Publik". *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5(3)*, 1-19.

PPPK memiliki posisi strategis, terutama dalam mendukung tugas-tugas administratif, teknis fungsional, serta pengelolaan sistem informasi berbasis pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan (Pusdiklat Tekfunghan) Badiklat Kemhan telah melaksanakan program diklat orientasi PPPK sebagai bentuk pembekalan awal sebelum individu menjalankan tugas-tugas fungsional di unit kerja masing-masing. Namun demikian, efektivitas program ini belum sepenuhnya terukur secara sistematis, terutama dalam kaitannya dengan kesesuaian kurikulum, kesiapan sumber daya, tanggapan peserta, serta dampak jangka panjang terhadap organisasi.²

Kualitas pendidikan dan pelatihan memiliki peran sentral dalam menentukan efektivitas dan efisiensi hasil belajar peserta Diklat. Semakin tinggi kualitas Diklat, semakin besar kemungkinan peserta memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebaliknya, jika kualitas Diklat rendah, maka efektivitas pembelajaran akan berkurang dan dapat berdampak pada kinerja individu serta organisasi secara keseluruhan. Untuk memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan tetap terjaga, diperlukan sistem evaluasi yang komprehensif.

Kualitas pendidikan dan pelatihan memiliki peran sentral dalam menentukan efektivitas dan efisiensi hasil belajar peserta Diklat. Untuk memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan tetap terjaga, diperlukan sistem evaluasi yang komprehensif. Evaluasi diklat juga menjadi hal yang krusial dalam memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat memenuhi standar nasional dan internasional yang berlaku. Dengan demikian, pengembangan SDM melalui Diklat yang berkualitas bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing dan kesiapan menghadapi perubahan global. Berdasarkan hasil survei *grand tour*, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan evaluasi program diklat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan, Badiklat Kemhan RI telah teridentifikasi menjadi hal yang tidak

² Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badiklat Kemhan RI. (2024). Jakarta.

bisa diabaikan, karena melalui program diklat yang terstruktur dan berstandar tinggi, kompetensi tenaga teknis dapat terjamin. Dengan demikian, evaluasi program diklat menjadi langkah krusial untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan dan dapat menghasilkan *output* yang berkualitas.

Di Indonesia, evaluasi Diklat diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di internal Kementerian Pertahanan. Salah satu dasar hukum utama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menjadi landasan yang mengatur pelaksanaan diklat di berbagai sektor, termasuk sektor pertahanan. Peraturan ini memberikan panduan dalam hal evaluasi termasuk di dalamnya evaluasi terhadap kurikulum, metode pembelajaran, dan penyelenggaraan diklat. Di tingkat yang lebih spesifik, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 memberikan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan diklat di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk standar pendidikan, kurikulum, dan evaluasi program diklat yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga teknis fungsional yang berkualitas.

Dengan melakukan evaluasi berkala, Pusdiklat Tekfunghan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan dan inovasi program.³ Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategis, memastikan bahwa program diklat tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga hasil yang dicapai oleh peserta diklat. Evaluasi program diklat bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Diklat telah sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan Diklat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, didukung oleh penelitian Fitriani di sektor pertahanan menyatakan bahwa kualitas pelatihan sangat berkorelasi dengan persepsi peserta terhadap kesiapan organisasi dalam

³ Warsiyah (2024). Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI.

menerima perubahan digital. Mengingat luasnya cakupan dan pentingnya diklat di Pusdiklat Tekfunghan, dibutuhkan pendekatan evaluasi yang tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan persepsi *stakeholder*.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satu pendekatan evaluasi pelatihan yang dianggap efektif adalah model CIRO yang dikembangkan oleh Warr, Bird, dan Rackham (1970). Model evaluasi CIRO (*Context, Input, Reaction, Outcomes*) merupakan pendekatan komprehensif yang menilai seluruh siklus pelatihan dari kebutuhan hingga dampaknya. Model evaluasi ini menawarkan kerangka evaluasi pelatihan yang menyeluruh, dimulai dari *Context* (kesesuaian kebutuhan pelatihan dengan kebijakan strategis), *Input* (kesiapan sarana, widyaiswara, kurikulum), *Reaction* (respon peserta terhadap proses pembelajaran), hingga *Outcome* (dampak pelatihan terhadap kinerja dan organisasi). CIRO sangat efektif dalam mengkaji pelatihan dari aspek kebijakan, sumber daya, persepsi peserta, hingga hasil yang dicapai. Penelitian berbasis model CIRO telah banyak diterapkan di Indonesia, seperti penelitian Mardiani yang mengevaluasi pelatihan berbasis kompetensi di Balai Diklat Keuangan. Temuannya menunjukkan bahwa pendekatan CIRO membantu institusi mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan organisasi dan hasil pelatihan yang dicapai.⁴ Begitupun hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pusdiklat Tekfunghan menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan sudah memuaskan, masih terdapat ruang perbaikan dari sisi komunikasi, bahan ajar, dan fasilitas.⁵

Dari sisi *Context*, pelatihan di Kemhan perlu diselaraskan dengan regulasi, seperti Permenhan Nomor 1 Tahun 2024 dan program kerja Pusdiklat Tekfunghan. Namun, secara keseluruhan evaluasi program diklat yang telah diselenggarakan menunjukkan penyampaian informasi pemanggilan pelatihan belum merata, menandakan perlunya peningkatan dalam aspek kebijakan komunikasi. Aspek *Input* dalam laporan tersebut menilai kesiapan instruktur, kurikulum, dan sarana prasarana. Meskipun

⁴ Mardiani, N. (2020). "Evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan Model CIRO di Balai Diklat Keuangan". Jakarta: Pusdiklat Kementerian Keuangan.

⁵ Warsiyah. (2024). Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.

sebagian besar dinilai memuaskan, peserta mengusulkan penyempurnaan bahan ajar menjadi format cetak/modul sebagai referensi kerja di instansi asal. Infrastruktur digital seperti koneksi Wi-Fi dan media IT dinilai perlu perbaikan karena belum stabil dan menyeluruh. Penelitian dari Rahmawati dalam pelatihan ASN BKN juga menunjukkan bahwa ketidaksiapan sarana IT menjadi hambatan besar dalam proses pembelajaran jarak dekat maupun jarak jauh.⁶

Dari sisi *Reaction*, laporan menampilkan persepsi peserta yang cenderung memuaskan terhadap pengajar (widyaiswara), namun menyarankan perbaikan dalam sistematika penyampaian materi. Persepsi positif terhadap tenaga kependidikan juga ditemukan, meskipun kecepatan respons registrasi dan informasi pelatihan masih harus ditingkatkan. Evaluasi reaksi peserta merupakan refleksi penting karena berdampak langsung terhadap keterlibatan belajar dan motivasi. Dalam studi Hasibuan, kepuasan peserta berbanding lurus dengan efektivitas penguasaan kompetensi pasca pelatihan.⁷

Aspek *Output*, menunjukkan seluruh peserta lulus dengan nilai rata-rata memuaskan, tetapi dampak jangka panjang terhadap kinerja organisasi belum dievaluasi secara menyeluruh. Menurut Kirkpatrick (2006), pengukuran output pelatihan idealnya mencakup perubahan perilaku dan hasil kerja nyata di tempat tugas. Hal ini belum menjadi perhatian utama dalam laporan evaluasi, sehingga menjadi celah penting dalam penelitian. Ke depan, pelatihan di Kemhan perlu dilihat bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban fungsional, tetapi juga sebagai instrumen transformasi organisasi.

Kesesuaian model CIRO dalam penelitian ini juga diperkuat oleh teori Sadler (1998) dan Rivai (2010) yang menekankan pentingnya *needs assessment* dan adaptasi kurikulum terhadap konteks tugas peserta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi pelatihan secara teknis, tetapi juga memberikan masukan strategis untuk peningkatan

⁶ Rahmawati, E. (2021). "Evaluasi Efektivitas Sarana Pembelajaran Jarak Jauh dalam Diklat ASN." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(3), 211–225.

⁷ Hasibuan, R. (2020). "Hubungan Kepuasan Peserta Diklat dengan Peningkatan Kompetensi Pasca Pelatihan." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 91–105.

mutu program diklat orientasi PPPK yang lebih relevan, kontekstual, dan berdampak nyata bagi efektivitas organisasi pertahanan.

Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, maka dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Data yang dikumpulkan dari peserta, pengajar, serta pemangku kepentingan lainnya akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas program Diklat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam perbaikan Diklat dapat lebih berbasis pada bukti dan fakta. Evaluasi yang baik juga memberikan dampak terhadap kesiapan sumber daya manusia di sektor pertahanan dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Secara keseluruhan, evaluasi program diklat di sektor pertahanan tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh sistem diklat dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan yang ada. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kualitas diklat dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, yang pada gilirannya mendukung kesiapan dan kompetensi tenaga teknis fungsional di sektor pertahanan. Diklat yang berkualitas akan melahirkan lulusan yang siap menghadapi tantangan strategis dan operasional di lapangan.⁸ Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem evaluasi program diklat menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan, guna memastikan bahwa program diklat yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.

Tanpa evaluasi yang menyeluruh dan berkesinambungan, upaya untuk meningkatkan kualitas diklat akan menghadapi berbagai kendala.⁹ Dengan

⁸ Kemhan, B. H. (2024). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Gelar Workshop Strategi Akselerasi Raih Akreditasi Bintang 3. Jakarta: Kemhan.go.id.

⁹ Sarvitri, A., Supriyanto, A., & Timan, A. (2020). "Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal." *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 38-51.

adanya evaluasi yang terstruktur, lembaga dapat melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan guna mencapai standar mutu yang lebih baik, yang juga sesuai dengan kebutuhan peserta dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam pelaksanaan evaluasi program diklat, serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan kebijakan yang didasarkan pada hasil evaluasi yang akurat, program diklat diharapkan dapat diselenggarakan dengan lebih efisien dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Dalam penelitian ini, penerapan model CIRO memungkinkan peneliti menilai bagaimana program orientasi PPPK Kemhan RI telah dirancang berdasarkan regulasi nasional seperti Keputusan Kepala LAN No. 289 Tahun 2022 dan kebijakan internal Kemhan (*Context*), seberapa siap infrastruktur pelatihan dan tenaga pengajarnya (*Input*), bagaimana persepsi peserta terhadap materi dan metode pembelajaran (*Reaction*), serta sejauh mana pelatihan berkontribusi pada pembentukan kompetensi ASN (*Outcome*).

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian evaluatif yang komprehensif untuk menilai sejauh mana program Diklat Orientasi PPPK Kemhan RI telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui pendekatan model evaluasi CIRO, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, respon peserta, serta dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi ASN PPPK di lingkungan Kementerian Pertahanan. Evaluasi ini tidak hanya penting sebagai refleksi atas pelaksanaan program, tetapi juga menjadi dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan pelatihan orientasi PPPK ke depan agar lebih kontekstual, adaptif, dan berdaya guna bagi organisasi.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi program diklat yang memiliki peranan penting guna mencapai mutu yang baik. Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan mutu diklat dapat terus

ditingkatkan, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta mendukung kinerja pertahanan negara secara keseluruhan, dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Menilai kesesuaian kebijakan dan standar evaluasi program diklat Orientasi PPPK dengan regulasi Kemhan RI (*Context*).
2. Mengevaluasi kesiapan widyaiswara, sarana prasarana, dan kurikulum, dalam mendukung pelaksanaan diklat Orientasi PPPK Kemhan (*Input*).
3. Menganalisis persepsi peserta, widyaiswara, dan manajemen terhadap implementasi evaluasi serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi (*Reaction*).
4. Mengevaluasi dampak evaluasi terhadap kualitas lulusan, kontribusinya terhadap efektivitas institusi pertahanan (*Outcomes*).

C. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan mempertimbangkan kompleksitas isu-isu yang terkait dengan diklat serta batasan sumber daya yang tersedia, penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana urgensi pelaksanaan evaluasi program diklat Orientasi PPPK dalam mendukung efektivitas pelatihan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI?
2. Sejauh mana kesiapan widyaiswara, sarana prasarana, dan kurikulum dalam menunjang evaluasi program diklat di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI?
3. Bagaimana persepsi peserta, widyaiswara, dan manajemen terhadap pelaksanaan diklat di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI?
4. Bagaimana dampak pelaksanaan diklat terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan diklat di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengidentifikasi kesesuaian kebijakan dan standar program diklat dengan regulasi dan kebutuhan strategis terkait orientasi PPPK di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badiklat Kemhan RI.
2. Untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya, hambatan teknis dan administratif, serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan diklat.
3. Untuk menganalisis persepsi dan respon peserta, instruktur, dan manajemen terhadap pelaksanaan diklat Orientasi PPPK di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badiklat Kemhan RI.
4. Mengevaluasi dampak pelaksanaan diklat Orientasi PPPK terhadap peningkatan kompetensi peserta dan kontribusinya terhadap efektivitas organisasi.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan manfaat dari penelitian ini terkait manfaat teoritis dan manfaat praktis yang terinci sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

1. Bagi Pusdiklat: Memberikan panduan untuk pengembangan konsep dan model evaluasi program diklat, khususnya di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badiklat Kemhan RI, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana konsep evaluasi mutu diklat dapat dilaksanakan secara efektif di sektor ini.
2. Bagi Pembaca: Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang gambaran yang jelas mengenai konsep, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam evaluasi program diklat di lembaga pendidikan formal, seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badiklat Kemhan RI.
3. Bagi Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat membantu memberikan pembelajaran praktis tentang bagaimana pelaksanaan evaluasi program diklat diterapkan secara efektif di

institusi pemerintah, khususnya dalam konteks pelatihan pertahanan, sehingga bisa diaplikasikan di lembaga-lembaga lain.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan evaluasi program diklat Orientasi PPPK berfungsi dan mengidentifikasi bagian-bagian yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi, lembaga dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu secara efektif, serta menyesuaikan standar yang ada dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru di sektor pertahanan dan keamanan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan kebijakan peningkatan mutu diklat, sehingga peserta diklat memiliki kompetensi yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan profesionalisme di Kementerian Pertahanan.

